

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK
PEMBUDIDAYA IKAN PATIN OLEH DINAS PERIKANAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA****Nadia¹, Siti Raudah², Sri Agusmila Aneta Herlinda³**

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: nadianad1814@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin merupakan program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor perikanan budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan program. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Dinas Perikanan, penyuluh perikanan, serta perwakilan kelompok pembudidaya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi program belum merata sehingga memengaruhi pemahaman dan partisipasi pembudidaya. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pendampingan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan koordinasi, penguatan sumber daya, serta perbaikan sistem pendampingan agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Pembudidaya Ikan

ABSTRACT

The empowerment of pangasius fish farming groups is a strategic program to improve community welfare and strengthen the aquaculture sector in Hulu Sungai Utara Regency. However, the implementation of this policy still faces various constraints that hinder the achievement of program objectives. This study aims to analyze the implementation of empowerment policies for pangasius fish farming groups carried out by the Department of Fisheries of Hulu Sungai Utara Regency. The research uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Department of Fisheries, fisheries extension officers, and representatives of fish farming groups. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that policy implementation has not been optimal. In terms of communication, the dissemination of program information has not been evenly distributed, affecting farmers' understanding and participation. In addition, limited infrastructure and human resources have become obstacles in training and assistance activities. These findings emphasize the need to improve coordination, strengthen resources, and enhance assistance systems so that empowerment programs can be implemented more effectively and sustainably.

Keywords: Implementation, Empowerment, Fish Farmers

PENDAHULUAN

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki potensi besar pada bidang perikanan budidaya. Salah satu komoditas unggulan yang

menjadi fokus pengembangan adalah ikan patin (*Pangasius sp*) karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan peluang pasar yang luas. Melalui pengembangan komoditas ikan patin, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang kerja, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Dalam konteks tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara memegang peran strategis dalam memberdayakan pembudidaya ikan patin agar mampu mengelola usaha budidayanya secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan di sektor perikanan. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Peraturan ini menegaskan bahwa kegiatan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian pelaku usaha perikanan agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan bagi kelompok pembudidaya ikan patin melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan. Melalui pelaksanaan program tersebut, dinas perikanan diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi ikan patin yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pembudidaya.

Dalam rangka mendukung kesejahteraan kelompok pembudidaya ikan patin, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan beberapa program pemberdayaan, antara lain bantuan benih ikan patin, bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti pakan ikan, pompa air, dan jaring, serta kegiatan penyuluhan dan penguatan kelembagaan kelompok. Program bantuan benih ikan patin bertujuan membantu pembudidaya dalam memenuhi kebutuhan benih awal guna meningkatkan produksi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena jumlah bantuan yang masih terbatas dan distribusinya belum merata. Program bantuan sarana dan prasarana budidaya seperti pakan ikan, pompa air, bibit ikan, dan jaring dimaksudkan untuk menunjang efektivitas kegiatan budidaya. Akan tetapi, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembudidaya sehingga masih menimbulkan kendala dalam proses produksi. Selain itu, program penyuluhan dan pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan pembudidaya dalam teknik budidaya ikan patin. Namun, keterbatasan intensitas penyuluhan menyebabkan peningkatan pemahaman pembudidaya belum merata. Selanjutnya, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melaksanakan program penguatan kelembagaan kelompok yang bertujuan memperkuat kemandirian serta ketertiban administrasi kelompok pembudidaya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kelembagaan kelompok belum berjalan secara optimal karena masih rendahnya partisipasi anggota serta kemampuan pengelolaan organisasi kelompok.

Pelaksanaan program pemberdayaan juga memiliki prosedur dan persyaratan tertentu. Hanya kelompok pembudidaya yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berhak menerima pembinaan dan bantuan. Proses pendaftaran dilakukan melalui penyuluh perikanan dengan melampirkan berita acara pembentukan kelompok serta kelengkapan administrasi, seperti buku kelompok dan kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan

Perikanan). Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh dinas bersifat terstruktur dengan menekankan pendekatan kelembagaan kelompok.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, terdapat beberapa permasalahan dalam kegiatan pembudidayaan ikan patin. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, seperti sarana operasional lapangan, peralatan teknis budidaya berupa pakan ikan, pompa air, bibit ikan, dan jaring, serta fasilitas pendukung kegiatan pelatihan dan sosialisasi, menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan belum dapat dilaksanakan secara rutin dan merata, sehingga jangkauan program pemberdayaan terhadap seluruh kelompok pembudidaya masih terbatas dan harus disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas yang ada.

Kedua, keterbatasan jumlah petugas yang profesional dalam kegiatan pemberdayaan ikan patin di Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan. Jumlah pegawai dan penyuluh perikanan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah kelompok pembudidaya ikan patin yang ada, sehingga intensitas kunjungan lapangan belum dapat dilakukan secara rutin dan merata.

Ketiga, kurangnya pendampingan dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kegiatan budidaya ikan patin menyebabkan sebagian pembudidaya belum sepenuhnya memahami tujuan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan program pemberdayaan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi pembudidaya dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan. Akibatnya, pelaksanaan program pemberdayaan di lapangan belum berjalan sesuai dengan perencanaan serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna, proses, dan realitas sosial secara holistik. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden yang dijadikan sebagai subjek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Patin Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagaimana dikutip oleh Agustino (2022). Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan. Adapun aspek-aspek implementasi kebijakan berdasarkan model George C. Edwards III menurut Agustino (2022)

1. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Setiap kebijakan, keputusan, maupun peraturan harus disampaikan secara jelas dan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Informasi yang disampaikan secara akurat, konsisten, dan tepat waktu akan membantu seluruh pihak terkait memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Transmisi

Transmisi merupakan proses penyaluran informasi kebijakan dari pelaksana kepada kelompok sasaran secara tepat dan efektif. Dimensi ini menekankan pentingnya sistem komunikasi yang berjalan secara lancar, terstruktur, dan berkesinambungan agar pesan kebijakan tidak mengalami perubahan makna atau penyimpangan saat diterima oleh kelompok sasaran maupun pihak terkait lainnya. Dalam konteks penelitian ini, transmisi merujuk pada bagaimana informasi mengenai pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya ikan patin disampaikan secara benar, merata, dan mudah dipahami oleh pembudidaya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa terjadi distorsi dalam proses implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Proses transmisi dalam pemberdayaan pembudidaya ikan patin telah terlaksana, namun masih perlu ditingkatkan dari sisi intensitas pelaksanaan dan pendalaman materi agar seluruh pembudidaya dapat memperoleh pemahaman yang lebih maksimal dan merata.

b. Kejelasan

Kejelasan informasi berkaitan dengan penyampaian isi kebijakan secara jelas dan mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Dimensi ini menuntut agar tujuan, prosedur, dan pelaksanaan kebijakan dapat dipahami secara seragam oleh pelaksana maupun pembudidaya. Dalam konteks penelitian ini, kejelasan informasi merujuk pada pemahaman pembudidaya terhadap pelaksanaan program pemberdayaan ikan patin, termasuk tujuan, manfaat, dan mekanisme keikutsertaan dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Kejelasan informasi dalam program pemberdayaan pembudidaya ikan patin dinilai sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyampaian yang lebih sistematis, lebih detail, serta penggunaan bahasa yang lebih sederhana agar seluruh pembudidaya, baik yang baru maupun yang telah berpengalaman, dapat memahami informasi secara komprehensif.

c. Konsisten

Konsistensi merujuk pada penyampaian informasi dan kebijakan yang tetap, tidak berubah, dan tidak saling bertentangan. Dalam implementasi kebijakan, konsistensi diperlukan agar seluruh pihak, baik dinas maupun pelaksana lapangan, memberikan penjelasan yang sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Hal ini penting agar pembudidaya ikan patin menerima informasi yang seragam dan dapat melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Kunjungan dan pendampingan yang dilakukan oleh petugas

Dinas Perikanan tergolong cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih rutin dan merata. Konsistensi dalam penyampaian informasi dan arahan kepada pembudidaya sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan program dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan secara optimal oleh para pembudidaya ikan patin sebagai penerima manfaat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan tidak dapat berjalan secara optimal. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, seperti kompetensi dan kemampuan pelaksana, serta sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan program. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga berperan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan. Pengelolaan sumber daya yang baik akan membantu memastikan tercapainya tujuan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif di lapangan.

a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana program harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar mampu menjalankan tugas secara efektif. Selain itu, motivasi, komitmen, dan kemampuan komunikasi juga berperan dalam keberhasilan penyampaian program kepada kelompok sasaran. Tanpa dukungan SDM yang kompeten, pelaksanaan kebijakan tetap berpotensi tidak optimal meskipun tersedia anggaran dan fasilitas pendukung.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Perikanan masih belum mampu mendukung pelaksanaan program pemberdayaan secara maksimal. Keterbatasan jumlah staf dan penyuluh perikanan menjadi kendala utama dalam menjamin seluruh pembudidaya memperoleh informasi serta pendampingan yang memadai.

b. Kewenangan

Kewenangan merupakan otoritas yang dimiliki individu atau lembaga untuk mengambil keputusan dan melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan jabatannya. Kewenangan mencakup penetapan kebijakan internal, pengambilan keputusan operasional, serta pemberian arahan dan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan belum berjalan secara optimal. Ketimpangan kompetensi menyebabkan sebagian pembudidaya belum memperoleh pendampingan yang memadai, sehingga capaian keberhasilan program belum dapat dimaksimalkan.

c. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk menunjang kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Dalam program pemberdayaan pembudidaya ikan patin, fasilitas meliputi peralatan teknis, media pendukung, sarana pelatihan, serta transportasi lapangan. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Pelaksanaan program pemberdayaan belum dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan fasilitas yang tersedia membatasi jangkauan kegiatan serta menurunkan kualitas pendampingan yang diberikan kepada pembudidaya di lapangan.

d. Informasi

Informasi merupakan kumpulan data, pengetahuan, atau keterangan yang dikumpulkan dan disampaikan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, serta pelaksanaan tugas. Informasi dapat berupa fakta, pedoman, maupun arahan yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. ketersediaan data yang ada masih belum memadai sehingga belum sepenuhnya mendukung perencanaan kegiatan dan penyesuaian program sesuai kebutuhan pembudidaya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan secara optimal dan kurang terarah. Selain itu, dinamika kondisi di lapangan yang terus berubah menuntut adanya pembaruan informasi secara berkala. Namun, keterbatasan dalam pembaruan data mengakibatkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pendampingan di lapangan belum sepenuhnya relevan.

3. Disposisi

Disposisi pelaksana merujuk pada sikap dan karakter, seperti dedikasi, integritas, dan komitmen dalam menjalankan kebijakan. Sikap yang positif akan mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sebaliknya, perbedaan pandangan atau sikap antara pelaksana dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas proses implementasi.

a. Efek Disposisi

Efek disposisi pelaksana merujuk pada pengaruh sikap, perilaku, dan komitmen pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan. Disposisi mencakup motivasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta cara berinteraksi dengan pihak terkait. Sikap pelaksana ini berpengaruh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan, sehingga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi program.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Penelitian ini dinilai berjalan dengan baik. Proses wawancara berlangsung secara komunikatif dan menghasilkan data yang relevan serta mendukung analisis implementasi program pemberdayaan pembudidaya ikan patin.

b. Melakukan Peraturan Birokrasi

Penataan birokrasi (Staffing the Bureaucracy) adalah proses menyiapkan dan mengatur pegawai sesuai jumlah, kemampuan, dan tugasnya. Tujuannya agar setiap pegawai memahami tanggung jawabnya dan mampu melaksanakan kebijakan secara efektif, sehingga pelaksanaan kebijakan lebih lancar dan terkoordinasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Temuan ini menegaskan bahwa sikap, komitmen, serta dukungan dari para pelaksana memiliki pengaruh yang positif terhadap pelaksanaan kebijakan, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas pendampingan.

c. Insentif

Insentif adalah pemberian yang bertujuan untuk memotivasi seseorang agar melakukan suatu tindakan atau meningkatkan kinerjanya. Insentif dapat berupa finansial, seperti uang, bonus, tunjangan, atau hadiah, maupun non-finansial, seperti pengakuan, sertifikat prestasi, kesempatan mengikuti pelatihan, atau promosi. Dengan adanya insentif, individu terdorong untuk bekerja lebih baik, mencapai tujuan tertentu, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Peneliti menemukan adanya upaya memberikan motivasi kepada pegawai melalui sistem penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas yang terstruktur dengan baik. Pegawai melaksanakan kegiatan pemberdayaan sesuai target program yang telah ditetapkan, termasuk pendampingan dan kegiatan lapangan, dengan kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian insentif mampu mendorong pegawai bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi yang memperlihatkan hubungan wewenang, tanggung jawab, dan alur komunikasi antarunit atau jabatan dalam suatu lembaga. Biasanya digambarkan dalam bentuk bagan hirarki mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf pelaksana. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, koordinasi antarbagian menjadi lebih mudah, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara teratur, dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP (Standard Operating Procedure) adalah prosedur standar yang menjabarkan langkah-langkah atau tata cara pelaksanaan tugas secara sistematis dan konsisten. SOP bertujuan agar pekerjaan dilaksanakan dengan cara yang seragam, efisien, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. kegiatan pemberdayaan dan laporan pelaksanaan program, diketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memiliki pedoman tertulis yang menjadi acuan bagi pegawai dalam menjalankan tugas. Dokumen tersebut memuat alur kerja, tahapan kegiatan, serta pembagian tanggung jawab secara jelas dalam pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya ikan patin. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pedoman tertulis membantu pegawai melaksanakan tugas dengan terstruktur, terarah, dan sesuai standar yang ditetapkan.

b. Fragmentasi

Fragmentasi adalah kondisi di mana organisasi atau sistem terbagi menjadi bagian-bagian yang tidak terkoordinasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, hal ini terjadi ketika tugas atau tanggung jawab antarunit tidak selaras, sehingga mengurangi efektivitas program. Contohnya, dalam program pemberdayaan, fragmentasi muncul jika beberapa bidang menangani hal yang sama tanpa koordinasi, menyebabkan tumpang tindih dan kurangnya integrasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa. Telah menyiapkan pedoman kerja berupa SOP, struktur organisasi, dan prosedur pelaksanaan program pemberdayaan. Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh pegawai sehingga setiap tugas dapat dijalankan secara jelas dan terstruktur. Dengan

adanya pembagian tugas yang sistematis dan alur kerja yang jelas, pelaksanaan program pemberdayaan dapat berjalan lebih lancar dan terkoordinasi dengan baik.

B. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Patin Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam setiap proses implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik faktor yang bersifat mendorong maupun faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pelaksanaannya.

Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan Patin Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara:

1. Faktor Pendukung

faktor yang mendukung keberhasilan program adalah pemahaman pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mereka dapat bekerja secara terarah dan menghindari tumpang tindih. Selain itu, antusiasme kelompok pembudidaya juga menjadi pendukung penting, karena mereka bersedia belajar dan mencoba pendekatan baru yang disarankan, sehingga proses pemberdayaan menjadi lebih efektif. Faktor pendukung lainnya adalah adanya sistem dan SOP yang jelas, yang memungkinkan pegawai mengikuti tahapan kegiatan dengan tertib dan meminimalkan kesalahan atau kebingungan. Dukungan fasilitas yang tersedia, meskipun belum sepenuhnya lengkap, turut mempermudah pelaksanaan kegiatan. Kombinasi antara pegawai yang memahami tugasnya, partisipasi aktif pembudidaya, dan pedoman yang jelas membuat program pemberdayaan dapat berjalan dengan lebih lancar.

2. Faktor Penghambat

faktor penghambat keberhasilan program pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan program pemberdayaan pembudidaya ikan patin. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah pegawai, sehingga tidak semua kegiatan dapat didampingi secara langsung. Selain itu, tingkat pemahaman dan kesiapan pembudidaya bervariasi; sebagian cepat menyesuaikan diri, sementara yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk mengikuti arahan. Hambatan lainnya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, baik dari segi alat maupun anggaran, serta kesiapan ASN yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan kondisi lingkungan.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah ditemukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan indikator pertama, transmisi program pemberdayaan telah dilaksanakan oleh Dinas Perikanan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Beberapa pembudidaya mengungkapkan bahwa sosialisasi program tidak dilakukan secara rutin dan penjelasan yang diberikan masih bersifat umum, sehingga pemahaman mereka terhadap program terkadang terbatas. Indikator kedua dan ketiga menunjukkan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan oleh Dinas Perikanan kepada pembudidaya secara umum sudah cukup baik. Informasi yang diberikan mampu membantu pembudidaya memahami tujuan program, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan kedalaman materi dan frekuensi komunikasi. Indikator keempat menyoroti aspek sumber daya manusia di Dinas Perikanan, yang masih tergolong kurang memadai. Keterbatasan jumlah pegawai dan variasi kemampuan individu menjadi tantangan dalam mendampingi semua kegiatan secara optimal. Meskipun demikian, indikator kelima menunjukkan bahwa kompetensi dan kemampuan petugas

secara umum sudah baik. Para petugas mampu melaksanakan tugas sesuai bidangnya, memberikan bimbingan, dan mendukung proses pemberdayaan dengan profesionalisme yang cukup tinggi. Indikator keenam menyoroti fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia di Dinas Perikanan. Walaupun belum sepenuhnya memadai, fasilitas yang ada tetap memberikan dukungan dasar bagi pelaksanaan program, meskipun perbaikan dan penambahan sarana masih diperlukan agar kegiatan dapat berjalan lebih efisien. Indikator ketujuh menunjukkan bahwa para pelaksana sudah memiliki informasi yang cukup mengenai kondisi pembudidaya, termasuk jumlah, lokasi, dan kebutuhan mereka. Hal ini memudahkan penentuan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Indikator kedelapan dan kesembilan menilai sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pemberdayaan. Secara umum, para pelaksana menunjukkan sikap yang baik dan komitmen yang cukup tinggi, meskipun terdapat variasi di antara individu. Sebagian besar mampu bekerja sesuai bidang tugas masing-masing, saling mendukung rekan kerja, serta responsif terhadap kebutuhan pembudidaya di lapangan, sehingga secara keseluruhan kinerja mereka tergolong cukup baik. Indikator kesepuluh menunjukkan peran pemberian insentif dan tunjangan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Insentif berupa tunjangan kinerja, bonus, dan penghargaan diberikan untuk menjaga motivasi, fokus, profesionalisme, dan konsistensi pegawai dalam melaksanakan tugas. Dengan adanya insentif ini, pegawai terdorong untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Indikator kesebelas dan kedua belas menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan telah didukung oleh pedoman dan SOP yang jelas, serta pembagian peran yang terstruktur sebagai acuan kerja bagi seluruh pegawai. Hal ini membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dapat dijalankan dengan tertib, mengurangi potensi kesalahan, dan meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan. Secara keseluruhan, berdasarkan 12 indikator tersebut, implementasi kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan patin oleh Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat disimpulkan berjalan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, seperti frekuensi sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan sarana prasarana, secara umum pelaksanaan program sudah berjalan terstruktur, terkoordinasi, dan mampu mendukung tercapainya tujuan pemberdayaan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2016). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Afriansyah, D., dkk. (2023). *Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

Andini, D., dkk. (2023). *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital pada aplikasi Klampid New Generation Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*

Anggara, S. (2018). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Arafat, Y. (2023). *Implementasi kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.



Suluh, D. (2022). *Kebijakan Publik : Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta : Samudra Biru

Fitria, Y. A. (2019). Implementasi program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembudidayaan ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 45–57.

Hayat. (2018). *Kebijakan publik: Teori, konsep, dan aplikasinya di Indonesia*. Malang: UB Press.